

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN  
STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI  
(Studi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**INDRA BANGSAWAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI (Studi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

Oleh :

Indra Bangsawan

Berdasarkan data Laboratorium Desa Universitas Lampung tahun 2017, Desa Sungai Langka sudah meningkat statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Oleh karena itu perkembangan ini perlu dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Sungai Langka dan strategi menuju desa mandiri. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai langka berkembang antara lain: Pertama, adanya prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. Kedua, masyarakat yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu mengorganisir masyarakatnya.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, dimensi modal sosial sudah terpenuhi dengan baik. Sedangkan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi permukiman sebagian belum terpenuhi. Berdasarkan Indeks Ketahanan Ekonomi sebagian belum terpenuhi. Berdasarkan Indeks Ketahanan lingkungan seluruhnya sudah terpenuhi. Desa Sungai Langka menerapkan strategi menuju desa mandiri dari dalam yaitu: mengoptimalkan prakarsa atau keinginan masyarakat untuk maju, mengoptimalkan kapasitas/kemampuan masyarakat, mengoptimalkan kapasitas kepala desa dalam mengorganisir. Mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun. Memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Melakukan musyawarah desa yang diikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Sungai Langka.

**Kata kunci : Desa, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri.**

## **ABSTRAK**

### **ANALYSIS OF VILLAGE DEVELOPMENT FACTORS AND STRATEGIES TOWARDS INDEPENDENT VILLAGES (Study In Sungai Langka Village Gedong Tataan District of Pesawaran Regency)**

By:

Indra Bangsawan

Based on data from the University of Lampung Village Laboratory in 2017, Sungai Langka village has increased its status from underdeveloped villages to developing villages. Therefore this development needs to be analyzed. The purpose of this study is to determine the factors causing the development of the village of Sungai Langka and the strategy toward an independent village. This type of research is descriptive with qualitative approach. The research location is in Sungai Langka Village Gedong Tataan Sub District Pesawaran with purposive sampling technique. This study uses data collection techniques: interview, observation, and documentation.

The results of this study are, factors that cause Sungai Langka village to develop, among others: First, the existence of initiative or desire to advance from the community itself. Secondly, communities that have capacity or ability. Third, the village head is able to organize his community. Based on the Social Security Index, the social capital dimension has been met well. While the dimensions of

health, education dimensions, dimensions of partial settlements have not been met. Based on the Economic Sustainability Index partially unfulfilled. Based on the Environmental Resilience Index have all been fulfilled. Sungai Langka village implements a strategy to independent villages from within: optimizing community initiatives or wishes to advance, optimizing community capacity / capacity, optimizing village head capacity in organizing. Facilitate bureaucracy and facilitate activities of a constructive nature. Strengthen village human resources through training and coaching and engage the community in development. Conducting village deliberations included in community leaders, religious leaders. Determine productive efforts at Sungai Langka village.

**Keywords: Village, Village Build Index, Independent Village.**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN  
STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI  
(Studi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh:**

**INDRA BANGSAWAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi

: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR  
PERKEMBANGAN DESA DAN  
STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI  
(Studi Di Desa Sungai Langka  
Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: **Indra Bangsawan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316021041

Jurusan

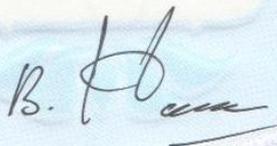
: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

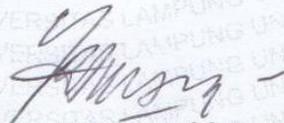
1. **Komisi Pembimbing**



**Budi Harjo, M.IP.**

NIP 19680112 199802 1 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



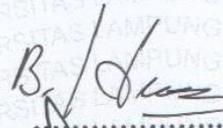
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

NIP 19611218 198902 1 001

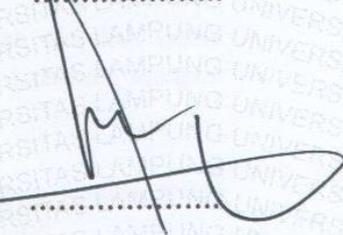
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Budi Harjo, M.IP.**



**Penguji Utama : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2017

buat Pernyataan



Indra Bangsawan  
NPM. 1316021041

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Indra Bangsawan lahir di Bandar Lampung 19 September 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rupawan Bahrin dan Ibu Kristina.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sukabumi Kota Bandar Lampung pada tahun 2001-2007, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandar Lampung pada tahun 2007-2010, Selanjutnya pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Ujian SBMPTN. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

## **MOTTO**

*Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.*

*(Nabi Muhammad SAW )*

*Jangan Lelah Untuk Berdo'a dan Berusaha  
Karena Kita Tidak Tahu  
Do'a Mana yang Akan Dikabulkan Dan  
Usaha Mana yang Berhasil Dilakukan*

*(Anonymous)*

*Kamu Tidak Akan Pernah Tau Apa Hasilnya Jika Tidak Mencoba*

*(Indra Bangsawan)*

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

### Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk  
segala yang telah kalian lakukan untukku, cinta, kasih sayang,  
do'a yang tiada henti, dan pengorbanan, serta motivasi yang selalu diberikan  
dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.

### Udo, Abang, dan Keluarga

Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi  
untuk keberhasilan dan suksesanku dan kita semua.

Keluarga Besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku.

Sahabat dan teman-temanku yang tulus, terimakasih atas kebersamaan dan  
dukungannya selama ini.

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung. Yang selalu memberikan  
bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah  
jauh lebih baik di masa depan.

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku, Ayahandaku Rupawan Bahrin dan Ibundaku Kristina terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Bunda selalu dalam

lindungan Allah Swt. Terimakasih atas segalanya semoga anakmu ini bisa menjadi penjamin kebahagiaan kalian berdua dunia akhirat.

3. Udoku Dian Kurniawan, dan Abangku Deni Darmawan beserta keluarganya, Paduka Meri Susanti, Keponakanku Reyhans Darmawan, Zaskia Angelina Putri Darmawan. Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, motivasi serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita sekeluarga.
4. Keluarga Besar pamanku, Ama Riagus Ria dan Bunda Meliyana, adik-adikku, Ahmad Sulthon Fad Hottob, Salsabila Zati Alwan, Salman Alfarizi, Seraden Ria Ketii. Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
5. Keluarga Besar Penulis, Keluarga besar Yayik Syahmin Ahyar dan Keluarga besar Tamong Bahrin. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
8. Bapak Budi Harjo, M.IP. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
11. Seluruh pihak Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Langka yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.
12. Teman, Sahabat sekaligus Saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Ardiyanto, S.I.P., Tri Hendra, S.I.P., Nurkalim, S.I.P., Iqbal Nugraha, S.I.P., Restu Aditya Putra, S.I.P., Yogi Noviantama, S.I.P., Rizko Afitrian Yahya, S.I.P., Ahmad Irfan, S.I.P., Danni Pangaribowo, S.I.P., Yones Sepriansyah, S.I.P., Agung Aditya Pratama, S.I.P., Rahma Adi Putra, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P., Winda Dwi Astuti Herman, S.I.P., M.I.P., , terimakasih kebersamaanya, kekonyolanya, selalu mendukung dan selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung dan membuat perkuliahan lebih berwarna, semoga kita selalu berteman, bersahabat, dan bersaudara sampai nanti. Sukses untuk kita semua, aamiin.
13. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2013 yang tidak disebutkan satu-persatu, semoga kita semua menjadi sarjana yang mampu

menggapai cita-cita dan menjaga nama baik Universitas Lampung dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

14. Teman sekelompok KKN Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Dedi Yansyah, Eric Evonsus S, Mydori Putri, Rifaldhi AW, Vyna Ayu Ramadian Saputri, Yona Annisa. Terimakasih telah membuat 40 Hari selama KKN penuh dengan Bahagia bercanda dengan kalian, main Uno, PES, Film, nyanyi suka-suka (bahagia itu sederhana), sedih (saat dengerin curhat kalian yang ga seberapa hahaha) drama (ngambek-ngambekan...duuh maafkan diriku ya kalo banyak ngatur hahaha) dan sukacita.
15. Teman-teman Nyinyir, Disti Isna Wardani, Gagah Prascoyo, Melia Trianggraini, Vyna Ayu Ramadian Saputri, Shiska Yulistina, Eric Evonsus, Mydori Putri. Semoga kita tetep sering sama-sama yaaa.
16. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.
17. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Tiada gading yang tak retak maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Amin.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2017  
Penulis,

Indra Bangsawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Tentang Desa .....	12
B. Klasifikasi Dan Status Desa.....	22
C. Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM).....	25
D. Tinjauan Tentang Membangun Desa Dan Desa Membangun .....	27
E. Tinjauan Tentang Strategi.....	31
F. Strategi Desa Mandiri Menurut Kementerian Desa.....	33
G. Kerangka Pikir .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	48
E. Informan.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Pengolahan Data .....	53
H. Teknik Analisis Data .....	54
I. Teknik Keabsahan Data .....	55

<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	57
A. Sejarah Sungai Langka .....	57
B. Letak Geografis .....	58
C. Keadaan Topografi Dan Iklim .....	59
D. Keadaan Demografi .....	59
E. Pemerintahan Desa Sungai Langka .....	60
F. Keadaan Sarana Dan Prasarana .....	61
<b>V. Hasil dan Pembahasan</b> .....	63
A. Faktor-Faktor Penyebab Desa Sungai Langka Termasuk Desa Berkembang .....	67
B. Strategi Desa Menuju Desa Mandiri .....	106
C. Program Desa Sungai Langka Menuju Desa Mandiri.....	113
D. Potensi Untuk Menjadi Desa Mandiri .....	114
E. Hambatan Dalam Menuju Desa Mandiri .....	116
<b>VI. Simpulan dan Saran .</b> .....	119
A. Simpulan .....	119
B. Saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	8
2. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM .....	27
3. Perbedaan Konsep Membangun Desa Dan Desa Membangun .....	30
4. Informan Penelitian .....	50
5. Sarana Dan Prasarana Di Desa Sungai Langka .....	61
6. Triangulasi Data Penelitian .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
7. Kerangka Pikir .....	40
8. Masjid Al-Mutabaroq di Desa Sungai Langka .....	72
9. Kapel ST. Fransiskus Xaverius di Desa Sungai Langka.....	72
10. Poskamling di Desa Sungai Langka .....	74
11. Poskesdes Desa Sungai Langka .....	78
12. UPT Puskesmas Bernung.....	79
13. SDN 1 Sungai Langka di Dusun 1 .....	84
14. SDN 2 Sungai Langka di Dusun 3 .....	84
15. SDN 3 Sungai Langka di Dusun 1 .....	85
16. SDN 4 Sungai Langka di Dusun 9.....	85
17. SDN 5 Sungai Langka di Dusun 6.....	86
18. SMP 17.1 Gedong Tataan di Desa Sungai Langka.....	86
19. PAUD Annisa di Desa Sungai Langka .....	88
20. Taman Baca Kenanga di Desa Sungai Langka .....	89
21. Pipa-pipa yang mengalirkan air kerumah-rumah warga .....	92
22. Kondisi jalan Desa Sungai Langka .....	101
23. Kondisi jalan Desa Sungai Langka .....	102

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adisasmita (2006: 1) Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya sekitar 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan.

Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan. Jumlah desa saat ini mencapai 74.749 desa (Kemendagri, 2015), dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat desa.

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan), struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis

agraris. Kemiskinan dan ketertinggalan sangat dominan pada masyarakat desa, dibandingkan dengan masyarakat kota. Sektor modern yang sangat besar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi selalu mendapat kesempatan yang sangat luas, sehingga membawa kecenderungan melupakan potensi pedesaan (sektor tradisional).

Secara khusus perlu diberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan khususnya masalah-masalah yang menghambat proses pergerakan dan perubahan masyarakat pedesaan sehingga mereka dapat ikut serta dalam pembangunan nasional. Timbulnya perubahan-perubahan dengan variasi-variasi pendekatan terhadap pembangunan pedesaan, sebagai usaha untuk menyentuh dan memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat miskin disebabkan oleh kompleksnya dan sukarnya mengatasi keterbelakangan pedesaan.

Kesukaran tersebut tidak hanya bersumber dari faktor-faktor yang sifatnya ekonomis mikro, seperti kekurangan modal, teknologi yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang minim, tetapi juga hambatan-hambatan yang bersumber dari dimensi struktur masyarakat pedesaan, seperti susunan kekuasaan dan pola-pola kelembagaan tradisional. Untuk meningkatkan pembangunan di desa berbagai program pembangunan telah dilakukan, perencanaan dan implementasinya ternyata masih belum memberikan hasil yang optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan perhubungan (lancar atau tidak lancar).

Lokasi mengandung arti jarak suatu tempat (desa) dengan tempat lain yang berfungsi sebagai pusat dan dipengaruhi oleh kondisi prasarana perhubungan yang akan memberi pengaruh terhadap lancar atau tidaknya komunikasi sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Jarak desa terhadap ibu kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, kondisi jalan (perhubungan), kelas jalan, frekuensi jalan (kecepatan perhubungan) merupakan faktor-faktor penyebab adanya desa terisolir/ desa terpencil. Desa yang terpencil dalam arti kehilangan hubungan terhadap perubahan-perubahan dari luar dapat menyebabkan lambatnya proses perkembangan masyarakat desa.

Dalam perkembangan setiap desa untuk sampai pada klasifikasi tingkat perkembangan desa, diukur atau dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu yang ada pada setiap desa tersebut. Indikator tersebut antara lain keseimbangan kekuatan unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri serta intensitas pengaruh unsur luar, yang ditentukan oleh posisi desa terhadap pusat unit wilayah yang lebih besar dan pusat fasilitas.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan

sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa itu. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa. Penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis

desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama).

Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016 adalah terkait indeks desa membangun. Namun dalam penerapannya ada saja hal yang menjadi hambatan desa dalam menuju desa mandiri seperti sumber daya alam, letak geografis, dsb. Selain itu tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan desa menjadi desa mandiri.

Salah satu kendala yang mendominasi adalah tempat yang sulit di jangkau sehingga proses pembangunan terhambat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya.

Pada umumnya aspek sumberdaya manusia di pedesaan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta pengelolaan potensi yang belum berkembang. Hal ini lah yang terjadi di Desa

Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Desa Sungai Langka merupakan salah satu desa di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung merupakan desa dengan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar mata pencahariannya di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan wisata alam. Sumber : <http://kkn.darmajaya.ac.id/pendidikan/desa-sungai-langka> (di akses 2 Oktober 2016, pukul 21.08 WIB).

Pada tahun 2016 Desa Sungai Langka masih tergolong dalam tingkatan desa swadaya (tertinggal) yaitu desa yang belum mampu berdiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, dan urusan administrasi belum terselenggara dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, diketahui bahwa Desa Sungai Langka termasuk desa tertinggal.

Berdasarkan data Laboratorium Desa Universitas Lampung tahun 2017, Desa Sungai Langka saat ini sudah meningkat statusnya menjadi desa berkembang (desa madya). Desa berkembang, atau bisa disebut sebagai desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Sungai Langka sebenarnya mempunyai banyak potensi yang menjanjikan untuk menjadi desa mandiri, salah satunya di Desa Sungai Langka terdapat

peternakan kambing Etawa sehingga Desa Sungai Langka dikenal juga sebagai daerah pengembang peternakan kambing Etawa di Lampung. Dalam bidang perikanan, Desa Sungai Langka merupakan produksi ikan air tawar seperti Gurame dan Nila. Selain peternakan dan perikanan, perkebunan di Sungai Langka juga memiliki potensi untuk menjadi desa agrowisata yaitu perkebunan durian, salak, dan jeruk. Dari sektor home industri, terdapat juga potensi yang berasal dari usaha kecil menengah seperti keripik pisang, nangka, talas, dan singkong, juga ada usaha mobil-mobilan yang cukup dikenal.

Desa Sungai Langka sekilas sudah cukup maju dilihat dari keadaan rumah – rumah warga, dan keadaan desa secara umum. Dengan segala potensi yang dimiliki serta keadaan desa yang terlihat sudah cukup baik, nyatanya Desa Sungai Langka masih termasuk desa berkembang. Hal ini dikarenakan Desa Sungai Langka belum memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai perkembangan Desa Sungai Langka dan strategi menuju desa mandiri. Pemilihan Desa Sungai Langka sebagai tempat penelitian disebabkan keadaan Desa Sungai Langka yang sudah berkembang.

Penelitian tentang perkembangan Desa Sungai Langka Dan Strategi Menuju Desa Mandiri ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu meski sama-

sama meneliti tentang perkembangan desa dan desa mandiri. Tabel 1 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Agustinus Longa Tiza, dkk	2014	Jurnal	Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)
2	Almasdi Syahza dan Suarman	2013	Jurnal	Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan.
3	Edy Yusuf Agunggunanto, dkk	2016	Jurnal	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

*Sumber : diolah peneliti*

1. Penelitian oleh Agustinus Longa Tiza, dkk (2014) dengan judul Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). Perbedaan penelitian Agustinus Longa dkk dengan penelitian ini adalah, proses analisis dan mendeskripsikan realitas Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Kabupaten Timor Tengah Utara, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementataion*”.

Sedangkan dalam penelitian ini proses analisis menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dan strategi desa mandiri menurut Kementerian Desa.

Sumber data penelitian Agustinus Longa Tiza, dkk adalah masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan pada penelitian ini sumber datanya adalah masyarakat Desa Sungai Langka dan aparat Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Penelitian Oleh Almasdi Syahza dan Suarman (2013) dengan judul Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Almasdi Syahza dan Suarman adalah pada penelitian Almasdi dan Suarman, penulis memfokuskan masalah penelitian pada Kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan potensi ekonomi di pedesaan; serta bagaimana perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan penelitian ini memfokuskan apa saja faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Sungai Langka dan bagaimana strategi desa dalam mewujudkan desa mandiri. Perbedaan selanjutnya adalah, penelitian ini dilakukan Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sedangkan penelitian Almasdi Syahza dan Suarman dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti provinsi Riau

3. Penelitian oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk dengan judul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini meneliti bagaimana desa menerapkan strategi menuju desa mandiri

menurut Kementerian Desa. Sedangkan penelitian Edy Yusuf Agunggunanto, dkk meneliti bagaimana mewujudkan desa mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai Langka berkembang ?
2. Bagaimanakah strategi Desa Sungai Langka untuk membangun desa mandiri ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Sungai Langka dan strategi Desa Sungai Langka menuju desa mandiri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam membuat program desa menuju desa mandiri.

## **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan konsep perkembangan desa dan srategi menuju desa mandiri.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Desa**

#### **1. Pengertian Desa**

Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 2) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Ndraha (1981: 30) Dilihat dari sudut formal, desa-desa dewasa ini dapat digolongkan atas dua tipe, yaitu :

- a. Desa yang terdiri dari hanya satu dusun saja.
- b. Desa yang meliputi lebih dari satu dusun.

Desa yang disebut pertama terjadi melalui dua kemungkinan :

- a. Akibat pemecahan desa.
- b. Memang demikian turun-temurun.

Desa yang disebut kedua terbentuk juga melalui kemungkinan-kemungkinan:

- a. Akibat penggabungan beberapa desa kecil menjadi desa baru.
- b. Memang demikian turun-temurun.

Menurut Ndraha (1981:20) Unsur-unsur Desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah :

- a. Wilayah desa
- b. Penduduk atau masyarakat Desa
- c. Pemerintahan Desa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011: 77) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari uraian di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan staf. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Keuangan Desa

Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Dari uraian di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut yang berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

#### **4. Pembangunan Desa**

Menurut Amanulloh, dkk (2016:34) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknokratisme pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdiri di atas tiga matra. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa). Matra ini diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa). Matra ini mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. Ketiga, Lingkaran Budaya Desa (Karya Desa). Matra ini mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

**a. Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa)**

Matra ini bertujuan untuk memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upayanya menegakkan hak dan martabat. Memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektif warga desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya manusia warga desa itu yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan, kemiskinan dan bahkan marjinalisasi. Fakta ketidakberdayaan itu kini telah berkembang menjadi sebab, aspek dan sekaligus dampak yang menghalangi manusia warga desa hidup bermartabat dan sejahtera.

Kemiskinan berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Situasi ini diperburuk dengan adanya ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun informasi. Sehingga kehidupan masyarakat miskin di perdesaan dirasa semakin marjinal. Di sini, matra Jaring Komunitas Wiradesa menjadi dasar dilakukannya tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal desa.

Penguatan kapabilitas dilakukan dalam rangka peningkatan stok pengetahuan masyarakat desa, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan diluar sekolah (non formal). Melalui penciptaan komunitas belajar dan balai-balai rakyat sebagai media

pencerahan dengan basis karakteristik sosial dan budaya setempat. Tidak hanya sekedar menambah pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kapabilitas masyarakat desa merupakan modal penting dari tegaknya harkat dan martabat masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol jalannya kegiatan ekonomi dan politik.

**b. Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa).**

Matra kedua dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan suatu ihtiar untuk mengoptimalkan sumberdaya di desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep Lumbung Ekonomi Desa merupakan pengejawantahan amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk melakukan pengorganisasian kegiatan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta penggunaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lumbung Ekonomi Desa diarahkan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa. Sebagai basis kegiatan pertanian dan perikanan, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya sendiri dan di wilayah lain, tanpa melupakan penumbuhan aktivitas ekonomi produktif di sektor hilir.

Optimalisasi sumberdaya desa juga mesti tercermin dalam kesanggupan desa memenuhi kebutuhan energi yang juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa. Kemandirian ekonomi desa tercermin dari berjalannya aktivitas ekonomi yang dinamis dan menghasilkan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan di perdesaan. Termasuk mendorong kemampuan masyarakat desa mengorganisir sumber daya finansial di desa melalui sistem bagi hasil guna mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkeadilan.

Aktor utama Lumbung Ekonomi Desa dititikberatkan pada komunitas, tanpa mengesampingkan peran individu sebagai aktor penting kegiatan ekonomi desa. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi di desa utamanya mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa pada khususnya.

Dari aspek ini, organisasi ekonomi di desa berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomi itu dapat berupa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), lembaga keuangan mikro, usaha bersama, atau yang lainnya. Selain itu dan tidak kalah pentingnya, lembaga-lembaga ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dan keterbukaan dalam menjalankan usaha perekonomian di desa.

Dalam konteks pelaksanaan UU Desa misalnya, pembentukan BUMDesa yang kuat mensyaratkan pengelolaan oleh orang-orang desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, serta mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi. Pokok soal yang utama adalah membekali masyarakat dengan aset produktif yang memadai sehingga akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih besar.

Sumber daya ekonomi harus sedapat mungkin ditahan di desa dan hanya keluar melalui proses penciptaan nilai tambah. Disinilah letak pentingnya intervensi inovasi dan adopsi teknologi serta dukungan sarana dan prasarana agar proses penciptaan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di desa berjalan secara baik.

Paradigma lama yang menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi sumberdaya alam dan tenaga tenaga kerja tidak terampil (*unskill labour*) telah menyebabkan terus meluasnya persoalan bangsa, mulai dari: tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tersingkirnya pengetahuan dan kearifan lokal warga, terabaikannya peran strategis perempuan, rendahnya daya saing, hingga meluasnya kerusakan lingkungan.

Desa harus menjadi sentra inovasi, baik secara sosial, ekonomi, dan teknologi. Inovasi secara sosial dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas antarwarga dengan memegang kuat nilai-nilai dan budaya luhur di masing-masing desa. Inovasi secara sosial ini

nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya-lenting warga (*resilience*) dalam menghadapi berbagai tantangan di depan.

Inovasi secara ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas warga untuk menggeser model ekonomi eksploitatif ke arah ekonomi inovatif yang alat ukur keberhasilannya diantaranya: terbukanya lapangan pekerjaan di desa, meningkatnya nilai tambah produk, serta berkurang tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Sedangkan inovasi secara teknologi adalah sebuah kesadaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya alam lokal, teknologi lokal, dan sumberdaya manusia lokal.

**c. Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)**

Matra ini merupakan suatu proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya (kolektivisme) yang memiliki semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan bersama dengan pondasi nilai, norma dan spirit yang tertanam di desa. Matra ketiga ini mensyaratkan adanya promosi pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Gerakan pembangunan desa tidaklah tergantung pada inisiatif orang perorang, tidak juga tergantung pada insentif material (ekonomi), tetapi lebih dari itu semua adalah soal panggilan kultural. Berdasarkan Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, yang di dalamnya terdapat kebersamaan,

persaudaraan, solidaritas, dan kesadaran untuk melakukan perubahan secara bersama.

Dana desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa misalnya, harus dipahami agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Ketiadaan dana desa tidak boleh dimaknai tidak terjadi pembangunan. Karenanya dana desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Pembangunan desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai *code of conduct*, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan.

Tiga matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Komitmen untuk menjalankan program dan kegiatan di dalam lingkungan Ditjen PPMD dengan menggunakan pendekatan (metode) ini, diharapkan dapat melipatgandakan kemampuan mencapai target dan menghasilkan dampak yang bisa dipertahankan (*sustained impact*) untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

## **B. Klasifikasi Dan Status Desa**

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk

menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi,

dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda.

Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan desa tertinggal, dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal :  $< 0,491$
- b. Desa Tertinggal :  $> 0,491$  dan  $< 0,599$
- c. Desa Berkembang :  $> 0,599$  dan  $< 0,707$
- d. Desa Maju :  $> 0,707$  dan  $< 0,815$
- e. Desa Mandiri :  $> 0,815$

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik

sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat tertinggal.

Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang menjadi desa maju. Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa menuju desa mandiri. Desa berkembang, dan terutama desa maju, kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi desa mandiri.

### **C. Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa (Podes), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik  $\leq 3$  Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik  $> 10$  Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.

2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator :

- a. waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit,
- b. ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain,
- c. akses ke poskesdes, polindes dan posyandu,
- d. tingkat aktifitas posyandu dan
- e. kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\text{Indeks Variabel : } \frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$\text{IDM} = 1/3 ( \text{IS} + \text{IEK} + \text{IL} )$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

4. Untuk menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status desa: Tabel 2 berikut ini berupaya menyajikan klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM).

**Tabel 2. Klasifikasi Desa Berdasarkan Idm**

No.	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$ Dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599$ Dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015

#### **D. Membangun Desa Dan Desa Membangun**

Menurut Borni Kurniawan dalam buku Desa Mandiri, Desa Membangun (2015:17) Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi trade mark kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan dengan diskursus developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda.

Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek. Dalam kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah untuk mengambil dan membelanjakan sumber daya negara.

Hanya saja bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa. Pemerintah Orde Baru merubah birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim

orientasi pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal dieksploitasi sedemikian rupa hanya sekadar memenuhi target pertumbuhan.

Sementara kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai obyek pembangunan yang dilakukan pemerintah. Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan.

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.

Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan

mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (*rural development*) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centric*: otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkis, sektoral dan seterusnya.

Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya. Desa membangun adalah spirit Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat.

Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. Tabel 3 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

**Tabel 3. Perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) Dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa)**

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep Terkait	Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur lintas desa yang lebih baik</li> <li>• Tumbuhnya kota- kota kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga</li> </ul>

	sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i> , industri, wisata, dll.	• Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan ( <i>one village one product</i> )
--	---	--

Sumber: *Desa Membangun Indonesia (2014)*

## E. Tinjauan Tentang Strategi

Kata strategi menurut Bracker dalam Henee, dkk (2010: 53) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani klasik, yakni “*strategos*” (Jendral), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Strategi merupakan salah satu hal penting karena ia memberikan landasan mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi mempunyai andil besar dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Strategi memberikan pilihan tentang apa yang tidak perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan.

Strategi menurut Nawawi (2012: 147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategi” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Sedangkan menurut Chandler dalam Akdon (2011: 12) mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi

didalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Jauch dan Glueck (1994: 13) mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Tetapi strategi bukanlah sekedar rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu. Disatukan artinya strategi mengikat semua bagian organisasi menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, artinya strategi meliputi semua aspek yang penting pada suatu organisasi. Sedangkan strategi itu terpadu, artinya semua bagian rencana strategi satu sama lain bersesuaian.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan oleh individu organisasi baik organisasi publik maupun organisasi swasta dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Strategi dalam hal ini merupakan bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), dimana rencana merupakan produk dari perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen. Selain itu, strategi dapat dipandang sebagai suatu alat yang dapat menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## F. Strategi Desa Mandiri Menurut Kementerian Desa

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa.

Mengapa tidak membawa transformasi desa ? Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa. Eksperimentasi pembangunan desa dengan model yang sama juga masih muncul secara jamak di era reformasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian/Lembaga ramai-ramai membuat program di desa yang identic dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat fragmented tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumber pendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini, desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. Masing-masing program memiliki *court of conduct*, aturan main dan pelembagaan *project* berbeda, tapi bermuara pada lokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi.

Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat intervensionis. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal. Secara skematik, posisi program-program seperti ini berada di luar sistem desa, namun memiliki pengaruh intervensionis yang kuat. Tambahan pula, program-program yang tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa seperti menguatnya kapasitas pemerintahan desa, menguatnya partisipasi, emansipasi warga maupun organisasi warga desa, serta kemandirian pengelolaan keuangan desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan dalam desa (*endogenous*) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemudikan dari luar desa (*exogenous*). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara.

Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kurniawan (2015: 27) dalam buku *Desa Mandiri, Desa Membangun* yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ada beberapa strategi dari kementerian

desa yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam.

Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Langkah – langkahnya antara lain:

- a. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa. Tujuannya apa ? Pertama, agar pemerintah desa mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah kedua, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.
- b. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut.

- c. Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa. Caranya bagaimana? Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi/peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.
- d. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa.

Desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup

banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis dengan organisasiarganya. Apa yang dilakukan sebagaimana bagian dari pembelajaran bagaimana organisasi desa yang diinisiasi masyarakat mampu mendorong lahirnya pemerintahan desa yang responsif atas hakarganya.

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan *local leadership* kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif- progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparat desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan.

Tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti air.

Salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya pertemuan gerakan pemberdayaan dari bawah dan dari dalam. Artinya, dari bawah terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif kesadaran publik warga desa. Sedangkan dari dalam berarti ada kemauan dari pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan

masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di desa.

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa).

## **G. Kerangka Pikir Penelitian**

Desa Sungai Langka telah meningkat statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Untuk menjadi desa mandiri Desa Sungai Langka harus memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

Menurut Kementerian Desa strategi menuju desa mandiri dari dalam yaitu Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diringkaskan ke dalam gambar kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic*), penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer (Kurniawan 2012:22). Hal yang penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk memperbandingkan data.

Metode penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila ia dipahami secara mendalam dan “tepat”. Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman responden melalui metode interview dan fokus group. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaring realita dilapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dilapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu untuk

menggambarkan serta mendeskripsikan faktor-faktor perkembangan Desa Sungai Langka dan strategi menuju desa mandiri. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri ”

## **B. Fokus Penelitian**

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2011:208) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Menurut Usman (2009:9) dalam penelitian kualitatif ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus, penelitian kualitatif ini menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian.

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Penyebab Desa Sungai Langka masuk kategori desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun. Dilihat dari komposit Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

A. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi:

1. Modal Sosial

Dimensi Modal Sosial terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

a. Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:

- Kebiasaan gotong royong di desa;
- Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar;
- Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
- Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:

- Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
- Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
- Terdapat keragaman agama di Desa.

c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:

- Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
- Partisipasi warga mengadakan siskamling;
- Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
- Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
- Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.

d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:

- Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
- Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
- Terdapat penduduk yang bunuh diri.

## 2. Kesehatan

Dimensi Kesehatan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
  - Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
  - Tersedia tenaga kesehatan bidan;
  - Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
  - Tersedia tenaga kesehatan lain.
- b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
  - Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
  - Tingkat aktivitas posyandu.
- c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.

### 3. Pendidikan

Dimensi Pendidikan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
  - Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
  - Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
  - Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
- b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
  - Kegiatan pemberantasan buta aksara;
  - Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC;
  - Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
- c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan

masyarakat atau perpustakaan Desa.

#### 4. Permukiman.

Dimensi Permukiman terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

##### a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:

- Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak;
- Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.

##### b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:

- Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban;
- Terdapat tempat pembuangan sampah.

##### c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.

##### d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:

- Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
- Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
- Terdapat akses internet.

B. Indeks Ketahanan Ekonomi memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi. Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

##### a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.

##### b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:

- Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);

- Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
  - Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
- c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
- d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
- Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
  - Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
  - Akses penduduk ke kredit.
- e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
- f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
- Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
  - Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
  - Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

C. Indeks Ketahanan Ekologi memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi. Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:

- Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
  - Terdapat sungai yang terkena limbah.
- b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
- Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
  - Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
2. Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan strategi Menuju Desa Mandiri dari dalam yang ditawarkan Kementrian Desa. Strategi tersebut terdiri dari:
- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis.
  - b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.
  - d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### **C. Lokasi Penelitian**

Menurut Moleong (2004 : 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian baik cara yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga untuk dijadikan pertimbangan penentuan lokasi penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dalam menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dalam hal ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan analisis. Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Sungai Langka merupakan salah satu desa yang sudah berkembang di kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan juga dikarenakan Desa Sungai Langka memiliki potensi untuk menjadi desa mandiri.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007:157). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

## 1. Data Primer

Data Primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lapangan. Data primer diperoleh peneliti menggunakan teknik observasi dan mewawancarai informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah yang serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

## E. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik penentuan informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar, jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Erwan Sukijo	Kepala Desa	Pemerintah desa
2	Junaidi Abdullah	Kaur Pemerintahan	Pemerintah desa
3	Kustini	-	Masyarakat desa
4	Purwanto	-	Masyarakat desa
5	Riyanti	-	Masyarakat desa
6	Yanti	-	Masyarakat desa
7	Yono	-	Masyarakat desa

*Sumber: Diolah Peneliti*

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik sebagai berikut:

### **1. Teknik Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara, yang keduanya bahkan boleh dibilang merupakan suatu kemutlakan (Tresiana, 2013:87). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Menurut Nazir (1999:212) observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata untuk tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Menurut Firdaus (2012:39) Observasi adalah teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu obyek atau

orang pada periode tertentu. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diselidiki, disebut observer langsung.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film atau rangkaian slide atau rangkaian foto. Pengamatan dilakukan karena apa yang dikatakan orang sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, digunakan strategi nonintervensi.

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variable perkembangan desa Sungai Langka dan strategi menuju desa mandiri dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Untuk penelitian ini peneliti mengadakan observasi dengan cara mengamati faktor-faktor perkembangan desa, strategi serta program-program pemerintah desa dalam menuju desa mandiri.

## **2. Teknik Wawancara**

Menurut Subagyo (2011:39) wawancara adalah kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,

2007:186).

Peneliti menggunakan teknik komunikasi langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih cepat.
- b. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat.
- c. Sifatnya lebih luas.
- d. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti.
- e. Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, yang dapat dikembangkan menjadi wawancara mendalam saat riset, agar mendapatkan informasi lebih akurat.

### **3. Teknik Dokumentasi**

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik (Moleong,2007:216). Sedangkan menurut Burhan Bungin (2011:142) dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain (Arikunto, 2002:206). Sesuai dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor perkembangan desa sungai langka dan strategi menuju desa mandiri.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan moleong (2006: 151) meliputi:

#### **1. Editing**

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan.

#### **2. Interpretasi**

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar kesimpulan kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan selain itu juga dapat menemukan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Menurut Widi (2010:253) analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data.

Menurut Silaen (2013:177) analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Menurut Arikunto (2010:53) pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna yang mengarah pada kesimpulan.

Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan analisis data non statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Hasan,2002:98). Data dianalisis dan diolah dengan cara:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan yang mendukung penelitian ini.

2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.
3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya yaitu merupakan validitasnya.

### **I. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang *valid*. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Desa Sungai Langka**

Desa Sungai Langka terbentuk pada tahun 1975, merupakan desa pemekaran dari Desa Induk Bernung dengan sebutan Kampung Susukan. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor. 108/VI/AS/1975 tanggal 15 September 1975. Sebelum menjadi Desa pemekaran dengan sebutan “Kampung Susukan”, maka pada umumnya wilayah Sungai Langka merupakan areal perkebunan asing (Belanda), yang dibumi hanguskan oleh balatentara pendudukan Jepang pada tahun 1945.

Kemudian pada tahun 1945 mulai dilakukan pengusahaan/pengelolaan kembali tanah perkebunan tersebut, dan bertindak sebagai koordinatornya adalah Bapak Sabichun sampai dengan tahun 1950. Pada waktu itu Bapak Residen Lampung pada waktu itu Bapak Mr.Gele Harun ditempatkan salah satu Kompi Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang didatangkan dari JawaTimur, yaituKompi C dibawah pimpinan Bapak Lettu Suprapno. Areal yang diserahkan pengelolaanya untuk rombongan Kompi C CTN ini adalah sebagian ini adalah sebagian dari Areal tanah perkebunan Sungai Langka, dengan usaha dan kegiatan yang dipimpin oleh Bapak SADIKIN, dan DANKI C Bapak TU SUPRAPNO meliputi :

1. Perkebunan kopi dan karet
2. Pembuatan dan Pengairan (DAM C) di Way Linti
3. Kolam pemandian Sungai Langka
4. Pembangunan Perumahan untuk Anggota Kompi C

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 1945 berdasarkan Keputusan Presiden RI seluruh Anggota CTN tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka keseluruhan penduduk yang berada di areal Sungai Langka digabungkan kepada Pemerintahan Bernung dengan status pendudukan yang dipimpin oleh seorang kami tua, dan yang menjabat sebagai kami tua yang pertama adalah Bapak Sadikin.

## **B. Letak Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang berlokasi di Desa Sungai Langka. Desa Sungai Langka terletak di daerah dataran tinggi di kaki Gunung Betung, dan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Jarak Desa Sungai Langka dengan ibukota Kecamatan Gedong Tataan adalah dua km, sedangkan dengan ibukota Kabupaten Pesawaran adalah 18 km. Secara administrasi letak Desa Sungai Langka berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bernung dan Negeri Sakti.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kurungan Nyawa.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Negara / Gunung Betung.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wiyono dan PTPN VII Way Berulu.

### **C. Keadaan Topografi dan Iklim**

Permukaan tanah Desa Sungai Langka terdiri dari dataran tinggi yang berbukit kecil, kemiringan tanah 10 sampai dengan 20 persen dan bentuk tanah pegunungan serta lereng-lereng, dengan suhu udara dingin serta curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun. Curah hujan di Desa Sungai Langka rata-rata 4.000 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan keadaan iklim adalah :

- Bulan Oktober sampai dengan Maret adalah musim penghujan
- Bulan April sampai dengan September adalah musim kemarau.

Desa Sungai Langka dialiri oleh tiga sungai kecil yang tidak pernah kering sepanjang tahun dan dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan sehari-hari. Keadaan tanah di Desa Sungai Langka cukup mengandung air, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya mata air di kaki Gunung Betung yang dialirkan melalui pipa-pipa pada setiap rumah tangga dan air tersebut alirannya cukup besar sepanjang tahun dengan panjang pipa kurang lebih 4,5 km.

### **D. Keadaan Demografi**

Penduduk Desa Sungai Langka berjumlah 5.264 jiwa yang terdiri dari 2.7162 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.548 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Desa Sungai Langka terdiri dari 10 dusun dengan 31 Rukun Tetangga dan 1.329 jumlah rumah tangga. Tingkat pendidikan di Desa Sungai Langka tidak disampaikan menurut umur dan jenjang pendidikan, namun disampaikan bahwa penduduk Desa Sungai Langka rata-rata

berpendidikan. Hal ini dibuktikan dengan telah bebas buta aksara dan anak usia sekolah dapat bersekolah (Monografi Desa Sungai Langka, 2013).

#### **E. Pemerintahan Desa Sungai Langka**

Desa Sungai Langka memiliki sejumlah perangkat pemerintahan yang terdiri dari seorang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Seksi Teknis Lapangan, 5 orang Kepala Urusan dan 10 orang Kepala Dusun. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi perangkat desa di Desa Sungai Langka, akan diuraikan sebaai berikut :

1. Kepala Desa : Erwan Sukijo. SP
2. Kasi Teknis Lapangan : Ngatijan
3. Sekretaris Desa : Sumaryianto
4. Kaur Kesra : Saleman. ST
5. Kaur Pembangunan : Untung Dikromo
6. Kaur Pemerintahan : Junaidi Abdullah
7. Kaur Keuangan : Subagiyo
8. Kaur Umum : Sumariyanto
9. Kadus I : Sukarjo
10. Kadus II : Saimun
11. Kadus III : Dulgoni
12. Kadus IV : Suwardi
13. Kadus V : Bibit S
14. Kadus VI : Mataji
15. Kadus VII : Sukardi

16. Kadus VIII : Parijan  
 17. Kadus IX : Tukimin  
 18. Kadus X : Maryoto

*Sumber: Balai Desa, 2017*

## F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berlangsung tiap hari. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk terselenggaranya suatu proses acara. Secara rinci sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka, tahun 2013**

Sarana/Prasarana	Jenis	Jumlah
Peribadatan	Masjid	10
	Musolla/ Langgar	3
	Gereja	1
Pendidikan	PAUD	3
	TK	1
	SD Negeri	5
	SMP Swasta	1
Kesehatan	Poskesdes	1
	Posyandu	10
	Bidan	3
	Perawat/ Mantri	11
Olahraga	Lapangan Sepak Bola	1
	Lapangan Bulu Tangkis	1
	Lapangan voli	1
	Meja Pingpong	1
Ekonomi	Toko/Warung Klontong	7
	Warung Makan	35

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2014*

Tabel 5 menjelaskan keadaan sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka sudah cukup baik terlihat dari tersedianya beberapa jenis sarana/prasarana penunjang kegiatan masyarakat. Sarana dan prasarana ibadah sangat penting keberadaannya dalam suatu wilayah. Desa Sungai Langka yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 10 unit.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan pengetahuan suatu masyarakat. Desa Sungai Langka memiliki sarana pendidikan PAUD sebanyak 3 unit, Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit, SD sebanyak 5 unit, dan SMP sebanyak 1 unit. Selain ketersediaan sarana pendidikan, ketersediaan sarana, dan prasarana kesehatan seperti puskesmas sangatlah penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan modal utama seseorang untuk melakukan berbagai macam kegiatan.

Adanya sarana dan prasarana kesehatan dapat memudahkan warga untuk memeriksakan kesehatan anggota keluarganya. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Sungai Langka terdiri dari 1 unit Pos Kesehatan Desa, 10 unit Posyandu, serta terdapat tenaga kesehatan bidan sebanyak 3 orang, dan mantri atau perawat sebanyak 11 orang. Prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola, bola voli, dan bulutangkis pun cukup memadai di Desa Sungai Langka.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai Langka termasuk desa berkembang antara lain: Pertama, adanya prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. Kedua, memiliki kapasitas atau kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu mengorganisir masyarakatnya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai Langka termasuk desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun antara lain:

1. Dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial sudah terpenuhi dengan baik.
2. Dimensi kesehatan, indikator pelayanan kesehatan dan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan sudah terpenuhi tetapi indikator jaminan kesehatan belum terpenuhi.
3. Dimensi pendidikan, akses ke pendidikan dasar dan menengah sudah terpenuhi, tetapi indikator akses ke pendidikan non formal belum terpenuhi.

4. Dimensi permukiman yang terdiri dari indikator akses ke air bersih, listrik, dan komunikasi sudah terpenuhi sementara indikator akses ke sanitasi belum terpenuhi.
5. Dimensi ekonomi sebagian indikator seperti ketersediaan pusat pelayanan perdagangan dan keragaman produksi masyarakat desa sudah terpenuhi. sementara indikator lembaga keuangan, logistik belum terpenuhi.
6. Dimensi lingkungan yang terdiri dari indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana sudah terpenuhi.
7. Desa Sungai Langka menerapkan strategi menuju desa mandiri dari dalam, yaitu: Desa Sungai Langka mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun. Desa Sungai Langka memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Desa Sungai Langka melakukan musyawarah desa yang diikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Desa Sungai Langka menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Sungai Langka.
8. Potensi yang ada di Desa Sungai Langka untuk menjadi desa mandiri antara lain, dari sumber daya alam seperti hasil perkebunan dan pertanian, agrowisata, peternakan, serta *home industry*. Hambatan Desa Sungai Langka dalam menuju desa mandiri, yang pertama adalah hambatan dari masyarakat itu sendiri. Hambatan yang kedua adalah masalah finansial. Hambatan yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang masih rendah.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menjadikan Desa Sunagi Langka menjadi desa mandiri, Desa Sungai Langka harus mengoptimalkan prakarsa atau keinginan untuk maju. Mengoptimalkan kemampuan masyarakat. Serta mengoptimalkan kemampuan kepala desa untuk mengorganisir masyarakatnya.
2. Untuk dimensi modal sosial, sebaiknya pemerintah desa bersama masyarakat melakukan pembangunan atau perbaikan segala fasilitas pendukung dimensi modal sosial misalnya poskamling dan juga meningkatkan kegiatan seperti gotong royong, siskamling, serta menjaga toleransi sehingga mampu membuat Desa Sungai Langka menjadi desa mandiri.
3. Untuk memenuhi dimensi kesehatan sebaiknya pemerintah desa mulai melakukan koordinasi dengan Dinas kesehatan dan PT. BPJS untuk melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat agar mendapat jaminan kesehatan BPJS.
4. Untuk memenuhi dimensi pendidikan sebaiknya pemerintah desa mengadakan kembali pusat kegiatan belajar masyarakat seperti menjahit atau membuat kue untuk Ibu-ibu PKK.

5. Untuk memenuhi dimensi permukiman sebaiknya pemerintah desa mengadakan tempat pembuangan sampah umum untuk masyarakat Desa Sungai Langka.
6. Untuk memenuhi dimensi ekonomi, sebaiknya desa berkoordinasi dengan lembaga perbankan milik pemerintah maupun swasta untuk kemudahan akses terhadap kebutuhan perbankan, misalnya dengan memfasilitasi masyarakat dalam menabung, bertransaksi, atau memperoleh dana pinjaman dengan bunga rendah.
7. Untuk memenuhi dimensi lingkungan sebaiknya pemerintah desa tidak hanya melakukan pencegahan tetapi juga membuat simulasi tanggap bencana dan jalur evakuasi.
8. Untuk mengatasi hambatan seperti masyarakat yang belum tumbuh kesadarannya, belum ada rasa memiliki desa, rasa tanggungjawab, rasa kebersamaan yang bersama-sama ingin membangun dan mengembangkan desa. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan desa seperti musyawarah desa agar timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan desa karena merekalah yang akan merasakan dampak baik ataupun buruk dari kegiatan pembangunan desa.

9. Untuk masalah finansial dalam pembangunan seperti sarana dan prasarana, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan melakukan skala prioritas mengenai apa saja program yang lebih dulu dijalankan dan memanfaatkan swadaya masyarakat supaya efisien. Untuk penggunaan teknologi yang kurang sebaiknya desa mulai melakukan pelatihan seperti kursus komputer untuk aparatur desa agar dapat mengoperasikan teknologi komputer dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Akdon. 2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik Untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta
- Amanulloh Naeni, dkk.. 2016. *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa (Kompetensi Umum)*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2104. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*
- Firdaus, M. Azis. 2012. *Metode Penelitian*. Jelajah Nusa, Tangerang Selatan
- Gluek, William F dan Jauch, Lawrence R. 1994. *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Hamidi, Hanibal. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Selatan

- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jelajah Nusa, Tangerang
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1981. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Rianse, Usman dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Undang - Undang**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Jurnal**

Abdurokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas

Agustinus Longa Tiza, dkk. 2014. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten*. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Volume 14 Nomor 1

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Universitas Diponegoro Semarang

## **Sumber Lain**

<http://definisiimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-pelayanan-kesehatan.html> diakses tanggal 03 Mei 2017 pukul 21: 34 WIB

<http://kkn.darmajaya.ac.id/pendidikan/desa-sungai-langka>, di akses tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.08 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> diakses tanggal 03 Mei 2017 Pukul 21: 22 WIB

<http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/02/pengertian-konsep-ekonomi.html> diakses tanggal 04 Mei 2017 Pukul 18: 23

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63458/Chapter%20II.pdf?sequence=4> diakses tanggal 26 April 2017 Pukul 22:14 WIB

<https://sungai-langka.blogspot.co.id/>, di akses tanggal 2 Oktober 2016, pukul 20.37 WIB

<https://theaegis.wordpress.com/2009/03/25/membangun-desa-membangun-indonesia/>, di akses tanggal 18 Maret 2016, pukul 16.48 WIB

[http://www.radarplanologi.com/2016/07/konsep-dan-pengertian-permukiman-padat\\_13.html](http://www.radarplanologi.com/2016/07/konsep-dan-pengertian-permukiman-padat_13.html) diakses tanggal 04 Mei 2017 Pukul 12: 13 WIB

Laboratorium Desa Universitas Lampung. 2017